

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional sangat erat kaitannya akan pembangunan SDM yang digunakan dalam mencapai tujuan negara. Pembangunan daerah menjadi salah satu aspek terpenting yang selaras dengan proses pembangunan nasional dimana implementasinya merujuk pada kondisi riil sesuai dengan kondisi daerah di lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (PSPPR, 2023). Pembangunan daerah dikerjakan dengan menganalisis setiap kondisi serta peluang dari tiap-tiap daerah. Tujuan dari pembangunan nasional dalam sebuah negara adalah memberikan dan mewujudkan masyarakat yang adil beserta makmur, pemerataan materiil serta rohani, yang berdasar dari Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945, pada kerangka NKRI, kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kedaulatan negara. masyarakat pada suasana nasional yang aman, damai, tertib, beserta dinamis pada lingkungan sosial yang bebas, bersahabat, tertib, serta tentram.

Perencanaan pembangunan yang ada pada Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan dalam tingkat nasional ialah sebuah proses perencanaan dalam pembangunan yang disusun guna pembangunan jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek yaitu tahunan yang diselenggarakan oleh lembaga pada tingkat nasional, pusat, dan daerah. Tujuan daripada system perencanaan pembangunan nasional ialah guna pendudukan

koordinasi antara pelaku pembangunan; terjaminnya kohesi, sinkronisasi, serta sinergitas antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintahan, beserta antara pusat maupun daerah; membangun keselarasan serta konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, beserta pemantauan; pengoptimalisasi partisipasi masyarakat; dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, beserta berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, rencana pembangunan nasional dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau (RPJP) adalah dokumen perencanaan guna jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, baik di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau (RPJM) adalah dokumen perencanaan guna jangka waktu 5 (lima) tahun, baik pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.
3. Rencana Pembangunan Nasional Tahunan adalah dokumen perencanaan tahunan pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. (PSPPR, 2023)

Penjelasan diatas memberikan menjelaskan bahwa pembangunan nasional berlandaskan pelaksanaan nilai-nilai Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, maka hakekat pelaksanaanya adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusianya yang mana berkaitan dengan pembangunan nasional. Menurut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022) menyatakan bahwasanya definisi indeks pembangunan manusia yakni

meningkatkan rasio pilihan dari apa yang dimiliki oleh manusia, seperti umur panjang, sehat, berpendidikan dan memiliki akses yang dibutuhkan manusia agar hidup secara layak. Dari penjelasan pengertian di atas, dijelaskan bahwasanya definisi pembangunan manusia yakni Ketika manusia memiliki kehidupan yang layak sehingga mereka merasa hidup aman dan nyaman.

RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 yang disusun oleh Bapak Presiden dan Wakilnya yaitu Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, membuat sebuah visi dan misi di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yakni melakukan peningkatan pada mutu SDM, menciptakan produktivitas dalam struktur ekonomi, mandiri dan mempunyai daya saing, menciptakan pembangunan yang adil dan merata, membantu ketercapaian lingkungan hidup yang berkelanjutan, memberikan kemajuan dalam budaya dengan mencerminkan keberibadian bangsa, menciptakan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermatrabat, serta dapat dipercaya, memberikan perlindungan untuk segenap bangsa serta memberi proteksi pada warga Indonesia, penciptaan kelola pemerintah yang bersih, efektif, terpercaya, serta bersinergi dengan pemerintah daerah pada kerangka negara kesatuan. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020)

Upaya pencapaian visi yang ditetapkan yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” ada beberapa fokus yang dilakukan oleh Presiden serta Wakil Presiden dalam mencapai visi dan misinya dalam RPJMN 2020-2024, salah satunya adalah pembangunan SDM. Dalam pembangunan SDM, pemerintah membuat beberapa strategi layanan

dasar dan perlindungan sosial untuk mengatasi permasalahan di dalam pembangunan SDM, yaitu kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Melihat beberapa permasalahannya yaitu 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial, 40% rumah tangga miskin beserta rentan mempunyai aset produktif, dan Indeks Pembangunan Masyarakat : 0,65. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020)

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia adalah menyusun sebuah program berbasis pada penataan populasi, yaitu Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas. Kampung KB merupakan program yang dilaksanakan oleh BKKBN pada satuan wilayah tingkat desa untuk menyelenggarakan penguatan dan pemberdayaan keluarga untuk melakukan peningkatan mutu SDM, keluarga, serta masyarakat (BKKBN, 2023b). Kampung KB dibentuk berdasar pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terkait Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga yang bermutu dapat berupa keluarga yang dibentuk berdasar pada perkawinan yang substansial serta memiliki ciri sejahtera, kokoh, maju, merdeka, mempunyai anak yang sempurna, maju berpikir, dapat diandalkan, selaras, serta memiliki takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Peraturan Pemerintah no. 87 Tahun 2014 terkait Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, dan Sistem Informasi Keluarga mengungkapkan terdapat delapan fungsi keluarga, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan (Kominfo, 2017). Di Indonesia sudah

ada 17.524 Kampung KB yang dicanangkan, syarat Kampung KB pada dasarnya terdapat tiga hal utama, yakni :

a) Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat.

Adanya data kekurangan kependudukan dicari berdasarkan pada hasil pendataan keluarga, pendataan potensi desa serta data pencatatan sipil. Hal tersebut dipergunakan menjadi landasan ditetapkannya prioritas, sasaran serta program yang dikerjakan dalam suatu wilayah Kampung KB dengan berkesinambungan.

b) Sokongan dan komitmen Pemerintah Daerah.

Sokongan serta komitmen diartikan sebagai peranan aktif dari semua stakeholder, khususnya pada pemerintah daerah yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan. Peran aktif tersebut adalah dukungan dalam pengerjaan program atau aktivitas yang berjalan pada Kampung KB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c) Partisipasi Aktif Masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat yang dimaksud ialah keikutsertaan masyarakat pada saat mengelola serta melaksanakan kegiatan yang berada pada program Kampung KB, kegiatan tersebut dilakukan dengan berkelanjutan untuk melakukan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

Pada umumnya tujuan Kampung KB yakni guna melakukan peningkatan mutu hidup masyarakat pada tingkatan desa yang diatur dalam program kependudukan,

penataan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga demi mencapai pembentukan keluarga yang berkualitas (BKKBN, 2023b). Berbagai tujuan khusus daripada Kampung KB yakni:

- a) Peningkatan peran stakeholder yang terkait dalam memberikan edukasi mengenai program kependudukan;
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aspek pembangunan kependudukan;
- c) Memberikan pemahaman mengenai peserta KB aktif modern;
- d) Peningkatan kualitas keluarga melalui program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
- e) Peningkatan kualitas kelompok UPPKS;
- f) Meningkatnya kesehatan masyarakat;
- g) Jumlah kekerasan pada rumah tangga menurun;
- h) Melakukan peningkatan sarana prasarana pembangunan kampung;
- i) Melakukan peningkatan lingkungan kampung yang bersih beserta sehat;
- j) Melakukan peningkatan mutu sekolah penduduk usia sekolah;
- k) Melakukan peningkatan rasa kebangsaan serta cinta tanah air masyarakat.

(BKKBN, 2023)

Kampung KB sudah terbentuk dari tahun 2016 dan sudah terbagi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Jakarta, terdapat 165 Kampung KB yang dibagi di berbagai kota, kecamatan, dan kelurahan. Penelitian ini berfokus pada Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dilihat dari website Kampung KB terdapat 67.754 jiwa yang menggunakan program Kampung KB, penggunaannya terbagi menjadi balita, remaja, dewasa, pasangan suami istri, hingga lansia. Masih terdapat banyak masalah didalam program Kampung KB Pondok Kelapa, salah satunya adalah kurangnya SDM atau sumber daya manusia juga mempengaruhi keberlangsungan program, di Kampung KB Pondok Kelapa terdapat Pokja atau kelompok kerja yang bertugas dalam mengelola program Kampung KB, fungsi Pokja adalah membina masyarakat agar berpartisipasi pada saat mengikuti program Kampung KB yang dimana hal tersebut dilakukan untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri.

---

Jumlah anggota pokja yang sudah terlatih/tersosialisasi pengelolaan KKB **1 orang pokja terlatih**  
dari **10 orang total pokja**

---

***Gambar 1 Jumlah Anggota Pokja yang Terlatih di Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa***

**sumber: Website Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id))  
Kampung KB Pondok Kelapa**

Dilihat dari website Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)), Kampung KB Pondok Kelapa, Pokja atau kelompok kerja yang bertugas untuk menjadi pengelola program hanya terdapat satu anggota dari sepuluh anggota Pokja yang terlatih dalam pengelolaan Kampung KB di Pondok Kelapa, padahal Kampung KB Pondok Kelapa telah memberikan pelatihan kepada Pokja KKB (Kelompok Kerja Kampung KB). Klasifikasi program Kampung KB Pondok

Kelapa juga masih berstatus berkembang setelah tujuh tahun berjalan, hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakseringannya pengurus Kampung KB atau Pokja mengupload kegiatan-kegiatan program di website Kampung KB, dan anggota Pokja Kampung KB Pondok Kelapa masih belum sering mengupload kegiatan dalam website.

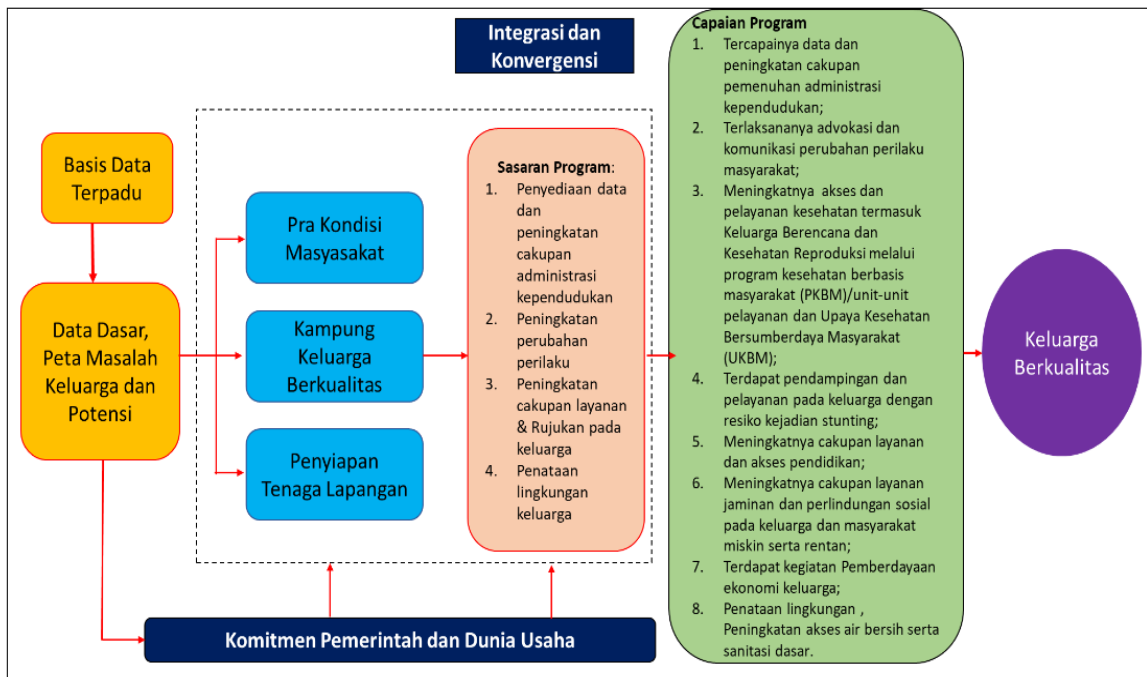
Sumber dana program Kampung KB berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dana desa, donasi, perusahaan, dan swadaya masyarakat. Sumber dana Kampung KB Pondok Kelapa, didapati dari swadaya masyarakat serta juga APBN, sumber dana tersebut diberikan kepada masyarakat tidak melalui uang tunai, tetapi anggota Pokja tidak mengetahui berapa anggaran yang terdapat dalam program Kampung KB Pondok Kelapa, hal tersebut diketahui saat bertanya kepada salah satu pengurus program Kampung KB Pondok Kelapa yang mengatakan bahwa:

***“ Kalau untuk anggaran Kampung KB itu bukan kapasitas Kami, Kami hanya memfasilitasi Kampung KB saja, untuk anggaran Kampung KB itu dari Kelurahan Pondok Kelapa.”***

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya Kampung KB masih belum mendukung keberlangsungan program dimulai dari kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dan tidak terkelolanya anggaran program Kampung KB Pondok Kelapa, sehingga menimbulkan beberapa masalah selanjutnya. Permasalahan selanjutnya adalah masih banyaknya kegiatan program berdasarkan sasaran dan capaian program yang masih belum terlaksanakan pada program Kampung KB, Kampung KB secara keseluruhan telah membuat sebuah sasaran



program dan capaian program yang akan diberikan kepada masyarakat Kampung KB, sasaran program dan capaian program akan dijelaskan pada gambar berikut:



**Gambar 2** Kerangka Konsep Kampung KB, sumber: Website Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)) Kampung KB

Sasaran program dan capaian program menjadi sebuah kategori dalam pembuatan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan program. Akan tetapi, pemberian kegiatan-kegiatan program Kampung KB Pondok Kelapa masih banyak yang tidak dilakukan, jika dilihat dari statistik yang dilakukan BKKBN, Kampung KB Pondok Kelapa masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan menurut kategori sasaran program dan capaian program, berikut adalah kegiatan yang belum terlaksanakan menurut statistik BKKBN:

- **Pendampingan Risiko Stunting:** pemeriksaan kesehatan calon pengantin, dukungan dan edukasi pengelolaan keluarga bagi calon pasangan usia subur, dukungan ibu hamil, pemeriksaan Prenatal Care (ANC) ibu hamil, dukungan

suplemen gizi ibu hamil KEK, Pemberian makanan pendamping ASI untuk anak usia 6-23 bulan, Pendampingan anak gizi buruk usia 24-59 bulan, Penanganan gizi buruk pada balita, pemberian gizi tambahan pada anak gizi buruk, pelayanan KB pasca melahirkan, Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur, Penyuluhan ibu/keluarga yang memiliki anak kecil termasuk gizi, masakan sehat hingga mengatasi stunting dan gizi buruk (DASHAT).

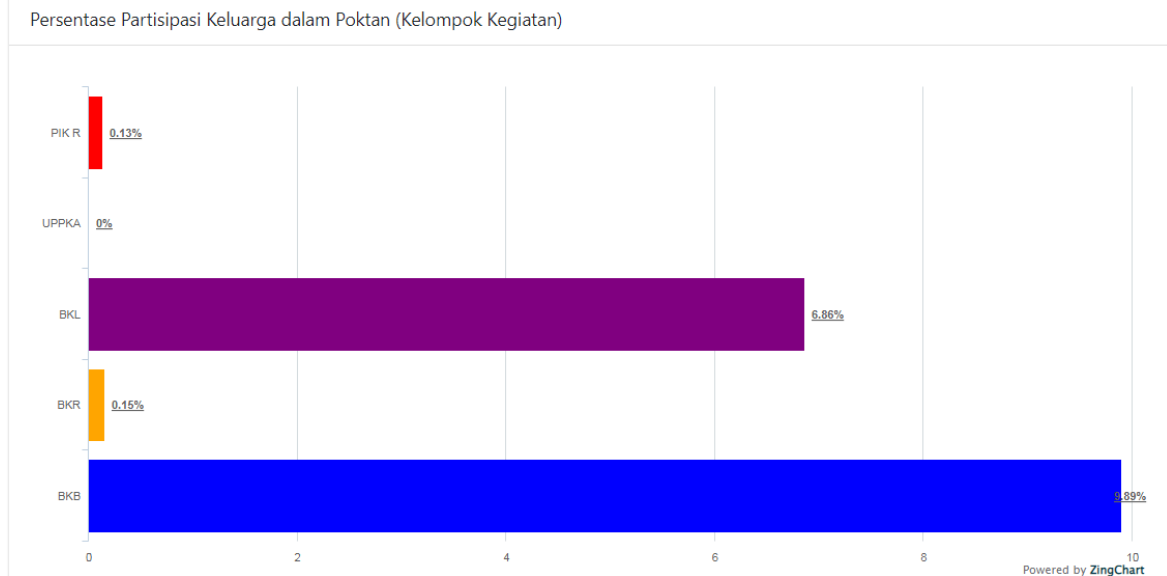
- Peningkatan Akses Pendidikan: Penyelenggaraan pendidikan dasar serta menengah, Pendidikan agama untuk masyarakat, Memberikan informasi serta kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, Memberi dukungan pendidikan bagi keluarga dalam keadaan sulit, Pemberian pendidikan literasi nonformal, Pemberian sarana olah raga dan kreatif.
- Gerakan Masyarakat Hidup Sehat: Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK), PIK Remaja , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana bagi Keluarga, Bimbingan Calon Pengantin Keluarga, KIE Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan, Advokasi dan KIE tentang pemberian ASI eksklusif kepada bayi serta anak kecil, Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pembangunan Rumah Tanpa Asap Rokok.
- Peningkatan Cakupan Layanan Jaminan: Memberi bantuan tunai bersyarat pada Pasangan Usia Subur, Memberi jaminan kesehatan kepada keluarga.
- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Memberikan program Keluarga Harapan bagi PUS, Meningkatkan jangkauan dan aset KPM, Meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan KPM, Memberikan dukungan bantuan permodalan,

Promosi serta pemasaran koperasi dan UMKM, Mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas, Meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga, Fasilitasi serta pembinaan pengembangan usaha nelayan, Dikelola dengan baiknya sistem pembenihan ikan yang berkelanjutan.

- Penataan Lingkungan Keluarga: Mewujudkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Menyediakan Akses Perumahan serta infrastruktur permukiman yang layak, aman maupun memiliki harga yang mudah dijangkau, Pengendalian vektor serta binatang sumber penyakit.
- Penyediaan Data Dan Peningkatan Cakupan Pemenuhan Administrasi Kependudukan: Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu), Pelayanan administrasi kependudukan
- Peningkatan Akses Dan Pelayanan Kesehatan Termasuk Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Melalui Program Kesehatan Berbasis Masyarakat (PKBM)/Unit-Unit Pelayanan Dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM): Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kespro, P2K2 dan KPM.

Selain kurang banyaknya kegiatan, adanya permasalahan tentang ikut andilnya masyarakat pada saat mengikuti beragam kegiatan yang diselenggarakan oleh program Kampung KB secara keseluruhan maupun Kampung KB Pondok Kelapa. Kampung KB Pondok Kelapa telah menyediakan macam-macam kegiatan yaitu PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), UPPKS (Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), BKL (Bina Keluarga Lansia), BKR

(Bina Keluarga Remaja), BKB (Bina Keluarga Balita). Berikut adalah persentase partisipasi keluarga dalam Poktan (kelompok kegiatan):

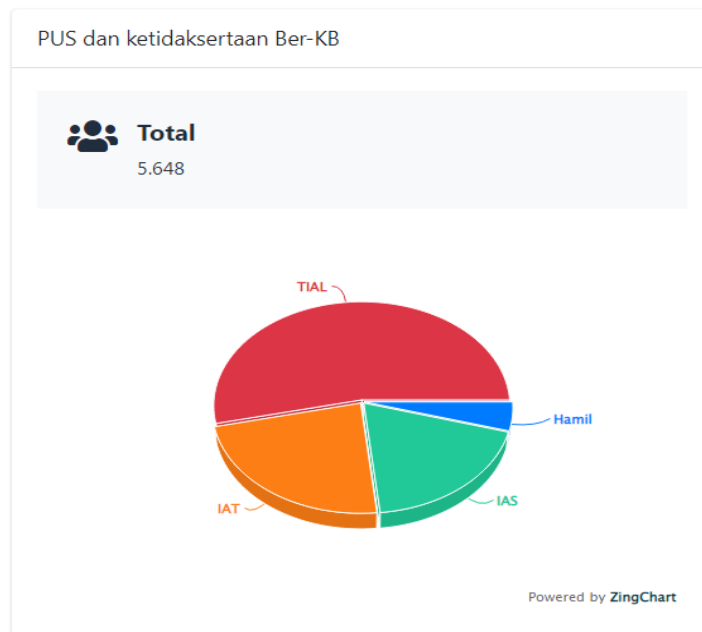


**Gambar 3** *Persentase Partisipasi Masyarakat dalam mengikuti Kelompok Kegiatan Program, sumber: Website Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)) Kampung KB Pondok Kelapa*

Dilihat dari persentasenya, menunjukkan bahwa keluarga yang mengikuti PIK R hanya 0,13% yaitu sebanyak 23 remaja dari 15.644 remaja yang berada di Kampung KB Pondok Kelapa, yang mengikuti BKL hanya 6,86% yaitu sebanyak 367 keluarga dari 5.353 keluarga yang memiliki lansia berada di Kampung KB Pondok Kelapa, yang mengikuti BKR hanya 0,15% yaitu sebanyak 12 keluarga dari 8.469 keluarga yang memiliki remaja berada di Kampung KB Pondok Kelapa, yang mengikuti BKB hanya 9,89% yaitu sebanyak 443 keluarga dari 4.481 keluarga yang memiliki balita berada di Kampung KB Pondok Kelapa, bahkan tidak ada keluarga yang mengikuti kegiatan UPPKS (Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), dalam tujuan khusus adanya indikator atau variabel yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan keluarga atau (UPPKS) atau yang sudah berganti nama menjadi UPPKA (Program Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Akseptor), sedangkan partisipasi masyarakat pada saat mengikuti kegiatan UPPKS yang tergambar dalam gambar 3 tidak ada masyarakat yang mengikuti kegiatan UPPKS. Hal tersebut membuat program Kampung KB Pondok Kelapa tidak berhasil dalam melaksanakan tujuan untuk melakukan peningkatan pada ketahanan keluarga dengan lewat Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan juga Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk adalah satu diantara tujuan program Kampung KB, melalui kegiatan pembinaan keluarga berencana atau KB secara modern. Kegiatan KB secara modern adalah metode kontrasepsi jangka pendek mencakup suntikan, pil, serta kondom, sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang mencakup IUD, suntikan, implan, MOW (tubektomi), serta MOP (vasektomi). Kegiatan KB sangat penting untuk stabilisasi hingga penurunan laju pertumbuhan penduduk, tetapi di program Kampung KB Pondok Kelapa masih adanya pasangan usia subur atau PUS yang tidak memakai kegiatan KB secara modern, berikut persentase PUS yang tidak memakai kegiatan KB secara modern:



**Gambar 4** *Persentase Masyarakat PUS (Pasangan Usia Subur) yang tidak mengikuti Program KB*, sumber: Website Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)) Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa

Berdasarkan gambar diatas, terdapat 5.648 keluarga atau pasangan usia subur yang tidak ikut serta pada program KB diantaranya IAS (Ingin Anak Segera) sebanyak 1073 keluarga, Hamil sebanyak 248 perempuan, IAT (Ingin Anak Tunda) sebanyak 1292 keluarga, TIAL (Tidak Ingin Anak Lagi) dengan jumlah 3035 keluarga. Hal tersebut menjelaskan bahwa program Kampung KB Pondok Kelapa masih belum melaksanakan tujuan program dengan baik, dikarenakan masih belum tercapainya tujuan peningkatan peserta KB modern dan masih tingginya persentase PUS yang tidak memakai kegiatan KB.

Tujuan utama program Kampung KB ialah peningkatan mutu kehidupan masyarakat dengan program kependudukan, penataan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga, dari tujuan utama tersebut terbentuk tujuan secara khusus yang berfokus pada kependudukan, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga

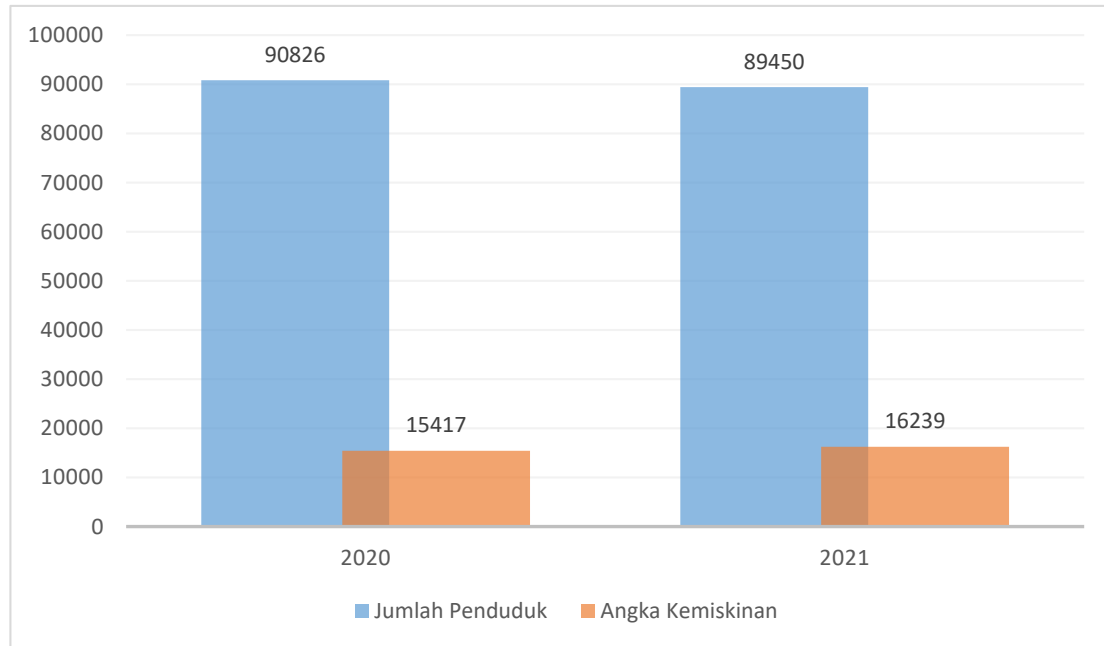
budaya. Penjelasan tentang tujuan program Kampung KB serta dikaitkan akan *output* program Kampung KB menghasilkan beberapa permasalahan terkait dengan tujuan utama program yaitu masih meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk Kelurahan Pondok Kelapa dari tahun ke tahun laju pertumbuhan penduduk Pondok Kelapa mengalami tren naik turun seperti pada tahun 2021 menurun sekitar seribu jiwa, tetapi adanya kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2022 sekitar 3.000 jiwa, sehingga adanya dampak yang diberikan Kampung KB terhadap laju pertumbuhan penduduk dan dampak tersebut bersifat buruk.

***Tabel 1*** ***Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Pondok Kelapa 2019-2022***

<b>Kelurahan</b>	<b>Tahun</b>			
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pondok Kelapa</b>	<b>89.411 Jiwa</b>	<b>90.826 Jiwa</b>	<b>89.450 Jiwa</b>	<b>92.886 Jiwa</b>

***Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik)***

Selain laju tumbuh penduduk yang masih tinggi, masih tingginya angka kemiskinan di Kelurahan Pondok Kelapa dihasilkan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di program Kampung KB Pondok Kelapa.



**Gambar 5 Grafik Tingkat Kemiskinan Kelurahan Pondok Kelapa pada Tahun 2020-2021, sumber: Kecamatan Duren Sawit**

Dari data diatas ditemukan pertumbuhan tingkat kemiskinan di Kelurahan Pondok Kelapa, pada tahun 2020 sebanyak 15.417 ribu penduduk yang mengalami kemiskinan dan mengalami peningkatan sebanyak 882 jiwa pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 angka kemiskinan Kelurahan Pondok Kelapa menjadi sebanyak 16.239 ribu penduduk miskin.

Penjelasan tentang permasalahan diatas memaparkan bahwasanya program Kampung KB tidak memberi kegunaan positif bagi masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa melainkan program Kampung KB Pondok Kelapa masih belum menjalankan program dengan baik. Dari persoalan itu maka peneliti memiliki ketertarikan dalam membahas permasalahan di Kampung KB Pondok Kelapa dengan pertanyaan **Mengapa Kinerja Sektor Publik Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan?**



## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam Program Kampung KB Pondok Kelapa.
2. Masih kurang terkelolanya anggaran Program Kampung KB Pondok Kelapa.
3. Masih banyak kegiatan program berdasarkan kategori sasaran kegiatan program yang belum dilaksanakan.
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat pada saat ikut aktivitas program Kampung KB.
5. Meningkatnya jumlah penduduk di Kelurahan Pondok Kelapa.
6. Meningkatnya angka kemiskinan di Kelurahan Pondok Kelapa.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Melihat daripada latar belakang beserta identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya seperti ini:

1. Bagaimana kinerja program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalahnya, maka berikut adalah tujuan penelitian:

1. Menganalisis kinerja program dari Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian, peneliti bisa mempraktekkan ilmu yang peneliti dapatkan daripada kegiatan pembelajaran dalam perkuliahan.

- b. Bagi Instansi Terkait

Dapat memberi solusi dalam memperbaiki Organisasi Kampung KB di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Besar harapan penelitian bisa memberi tambahan wawasan dan pengetahuan terkait seperangkat teori pada manajemen publik terkhusus pada saat memberi inovasi tentang layanan publik, serta diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengembangkan pengetahuan yang dipelajari secara teoritis.

## **1.6 Penelitian Terdahulu**

Penulisan penelitian ini terdapat serangkaian penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam membuat penelitian, terdapat beberapa persamaan serta perbedaan penelitian akan berbagai penelitian terdahulu. Penelitian yang dikerjakan oleh (Handayani et al., 2022) bertujuan untuk mengetahui

masuk, proses, dan keluaran dalam pelaksanaan Kampung KB sebagai salah satu wujudnya program peningkatan KKBK di Jawa Tengah. Menggunakan konsep *input*, proses, dan *output* menciptakan hasil penelitian yaitu pertama mengenai kontribusi pembuatan kawasan kampung KB yang termuat dalam kebijakan tersebut, andil masyarakat cukup baik tetapi dari segi sarana prasarananya masih sangat terbatas. Kedua, adanya proses yang mengkaitkan data, pelatihan serta partisipasi yang mana strukturnya belum terprogram secara sistematis. Ketiga, mempengaruhi hasil dimana tujuan khusus dibentuknya Kampung KB antara lain dengan menerapkan tri bina yakni BKR, BKB, BKL. UPPKS, PIK-R, bimbingan belajar serta perpustakaan pintar, sementara pada aktivitas interdisipliner mencakup drainase, toilet, pembibitan jagung, pembuatan bank sampah, pelatihan rumah industry, pelatihan peternakan itik serta perbaikan infrastruktur. Tetapi capaian bertahap dari program KKBPK masih belum sepenuhnya terealisasikan meskipun hanya membawa perubahan kecil dalam kesejahteraan masyarakat.

Pengkajian yang dikerjakan oleh (Sonia et al., 2022) tentang program Kampung KB memiliki tujuan guna mengeksplorasi keefektifan implementasi program Kampung KB serta dampaknya pada capaian MKJP di Kampung KB Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Dengan mempergunakan Konsep Evaluasi Input, Evaluasi Proses, Evaluasi Produk, serta Evaluasi Outcome, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung KB di Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi telah bekerja secara baik dari segi pelaksanaan aktivitas POKJA, keterwakilan petugas lapangan, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Kemudian, program ini juga menghadapi kendala

yang perlu diatasi, seperti alokasi tenaga PLKB/Sub PPKBD/ kader yang belum memadai, sokongan dana yang belum memadai, kurangnya kebijakan serta rendahnya daya percaya masyarakat pada MKJP.

Analisis yang dilakukan oleh (Libra, 2022) untuk mengetahui program Kampung KB memiliki tujuan guna mengetahui pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) pada Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Menggunakan teori BKKBN (2017), bahwa terdapat tiga indikator berhasilnya pelaksanaan kampung KB yakni input, proses, output, dengan hasil penelitian yaitu Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) pada Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah cukup. Karena indikator input, proses, dan output masih memperoleh kategori cukup. Dimana indikator input sudah terlaksana, walaupun hanya satu kegiatan yang masih aktif, yaitu kegiatan KB-KR. Hal tersebut terjadi akibat adanya wabah covid-19. Kemudian indikator proses tentunya tidak semua kegiatan aktif dan dilaksanakan secara berkala atau berkesinambungan, kecuali kegiatan KB-KR. Sedangkan indikator output belum tercapainya indikator proses yang diterapkan, kecuali pada kegiatan KB-KR yang meningkat secara signifikan.

Observasi tentang program Kampung KB yang dikerjakan oleh (Rianto et al., 2019) memiliki tujuan guna mengevaluasi program Kampung KB di Kota Tanjungpinang, memakai konsep *Input*, *Proses*, dan *Output*. Hasil penelitian yaitu kolaborasi interdisipliner yang dibangun hanya sebatas di bagian lintas sektoral tertentu. Satu di antara tantangan Program Kampung KB ialah kurangnya sokongan anggaran. Keengganan masyarakat guna jadi kader Kampung KB pada

PPKBD/Sub-PPKBD atau mengikuti POKJA Kampung KB, disebabkan oleh kurangnya insentif atau stimulan finansial yang disediakan untuk para kader Kampung KB. Selain itu, tantangan lainnya terletak pada bentuk fasilitas operasional yakni mencakup gedung sekretariat Kampung KB, meskipun ada di setiap Kampung KB, Kampung KB yang menumpang di bangunan lainnya yakni mencakup POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.

**Tabel 2 Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama penulis dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori dalam Penelitian	Hasil
1.	Suraji, Elimirillia Silvia Rini Saleda, Piet Hein Pusung, Ferdinandus Jaftoran, Romi Saputra, 2023 (Suraji et al., 2023)	Melakukan analisis efektivitas program Kampung KB sebagai alat menekan angka lahir serta tumbuh penduduk, melakukan identifikasi faktor yang menghambat dan berhasilnya serta usaha guna melakukan peningkatan efektivitas program pada masyarakat serta lingkungan	Kualitatif Deskriptif	Teori Efektivitas dari Duncan yang dikutip pada buku Richard M Steers (1985 : 53) dengan fokus Analisa yakni Pencapaian Tujuan, Adaptasi, serta Integrasi.	Program Kampung KB yang sudah dilakukan memang telah berlangsung dengan efektif, akan tetapi masih ada beberapa kurangnya yakni mencakup masih tidak ada pemaparan materi serta pembelajaran terkait meningkatkan perekonomian, memang pada segi kendali penduduk telah sangat baik serta memenuhi target, akan tetapi alangkah lebih baik lagi apabila bekerja beriringan (balance) pada meningkatnya ekonomi serta kendali penduduk supaya bisa melahirkan keluarga kecil mandiri.
2.	Adi Sukrianto, Gerry Katon Mahendra, 2023 (Sukrianto & Mahendra, 2023)	Mengetahui ikut serta publik pada program Kampung Keluarga Berencana pada	Kualitatif Deskriptif	Cohen serta Uphoff pada (Kalesaran et al., 2015) mengerjakan pengklasifikasian partisipasi menjadi empat tipe , yaitu: 1) <i>Participation in</i>	Partisipasi publik pada saat menentukan keputusan sudah terjadi secara baik, biarpun pada keputusan awal belum terlibat. Pada pelaksanaan, partisipasi masyarakat telah cukup aktif dilibatkan pada kelompok kegiatan yang ada, akan tetapi

		Kelurahan Sendangagung		<i>Decision Making</i> (Partisipasi pada pembuat keputusan); 2) <i>participation in Implementation</i> (Partisipasi pada penyelenggaraan); 3) <i>participation in Benefits</i> (Partisipasi pada perolehan manfaat); 4). <i>participation in Evaluation</i> (Partisipasi pada evaluasi).	tidak seluruh wilayah pada kelurahan mempunyai kelompok aktivitas. Pada saat memanfaatkan hasil, masyarakat sudah merasa banyak kegunaan melalui adanya program Kampung Keluarga Berencana. Dan pada evaluasi, masyarakat telah ikut andil baik dengan langsung maupun tidak.
3.	Arri Handayani, Najib, Sukma Nur Ardini, Padmi Dhyah, Yulianti, 2020 (Handayani et al., 2022)	Mengetahui masukan, proses, dan keluaran dalam pelaksanaan Kampung KB sebagai salah satu wujudnya program peningkatan KKBK di Jawa Tengah.	Kualitatif Deskriptif	Konsep <i>Input</i> , <i>Proses</i> , dan <i>Output</i>	Pertama, pada kaitannya akan input yaitu pembentukan wilayah kampung KB telah seturut pedoman, andil masyarakat cukup baik, tetapi sokongan sarana prasarana masih sangat minim. Kedua, pada kaitan akan proses yaitu data, pembinaan, serta penggerakan belum dijadwal dengan rutin. Ketiga, memiliki kaitan akan output yaitu wujud aktivitas di kampung KB diantaranya Tri Bina (BKB, BKR, BKL), UPPKS, PIK-R, bimbingan belajar serta perpustakaan pintar, sementara aktivitas daripada lintas sektor diantaranya mencakup drainase, jambanisasi, pembibitan jagung, bank sampah, pelatihan home industri, pelatihan ternak bebek, serta perbaikan infrastruktur. Tetapi, meningkatnya capaian program KKBPK belum dengan sepenuhnya dipenuhi, biarpun membawa sedikit perubahan di kesejahteraan masyarakat.

4.	Syahra Sonia, Andhiki Laksono Trisnantoro, Dwi Handono Sulisty, 2022 (Sonia et al., 2022)	Mengeksplorasi keefektifan implementasi Program Kampung KB serta dampak pada capaian MKJP di Kampung KB Desa Sumberjaya, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.	Kuantitatif dan kualitatif	Konsep Evaluasi <i>Input</i> , Evaluasi Proses, Evaluasi Produk, dan Evaluasi <i>Outcome</i>	Penerapan program Kampung KB di Desa Sumberjaya Kecamatan Gondanglegi sudah bekerja secara baik daripada segi pelaksanaan aktivitas POKJA, keaktifan petugas lapangan, serta ketersediaan alat kontrasepsi. Kemudian daripada itu, program mempunyai kendala yang mana dibutuhkan penanganan, yakni distribusi tenaga PLKB/Sub PPKBD/ kader yang tidak mencukupi, sokongan dana, belum ada kebijakan, serta taraf percaya masyarakat pada MKJP yang rendah.
5.	Rony Libra, 2022 (Libra, 2022)	Mengetahui pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.	Penelitian gabungan	BKKBN (2017), bahwa terdapat tiga indikator berhasilnya pelaksanaan kampung KB yakni input, proses, output.	Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah cukup. Karena indikator input, proses, dan output masih memperoleh kategori cukup. Dimana indikator input sudah terlaksana, walaupun hanya satu kegiatan yang masih aktif, yaitu kegiatan KB-KR. Hal tersebut terjadi akibat adanya wabah covid-19. Kemudian indikator proses tentunya tidak semua kegiatan aktif dan dilaksanakan secara berkala atau berkesinambungan, kecuali kegiatan KB-KR. Sedangkan indikator output belum tercapainya indikator proses yang diterapkan, kecuali pada kegiatan KB-KR yang meningkat secara signifikan.
6.	Eveline Ramadhiani, 2022 (Ramadhiani, 2022)	Mengetahui penerapan program Kampung KB RPTRA Delas pada	Kualitatif Deskriptif	Teori penerapan kebijakan mengacu pada pernyataan George C Edward III yakni komunikasi,	Penerapan program Kampung KB RPTRA Delas masih dinilai belum optimal dengan kata lain masih ada pada kategori dasar yang artinya belum berkembang. Walaupun demikian, kampung

		meningkatkan kesejahteraan keluarga pada wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Utara.		sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.	KB RPTRA Delas memberi pengaruh baik yakni memberi peningkatan pada kesejahteraan keluarga untuk penerima kegunaan program. Fasilitas yang disiapkan jadi satu di antara alasan terbesar dalam terjadinya peningkatan pada kesejahteraan keluarga pada wilayah Kelurahan Kebayoran Lama Utara, terkhusus pada akseptor atau penerima kegunaan program Kampung KB RPTRA Delas.
7.	Zakiah Jamaluddin, Muh Ilham, Udaya Madjid, 2021(Zakiah Jamaluddin et al., 2021)	Melakukan kajian serta mengetahui dengan jelas penerapan Program Kampung KB pada Kelurahan Dangerakko.	Kualitatif Deskriptif	Analisis penerapan kebijakan didasarkan pada teori penerapan kebijakan Charles O. Jones yang didasarkan pada tiga indikator, yakni organisasi, interpretasi, dan aplikasi	Penerapan Program Kampung KB pada Kelurahan Dangerakko bekerja baik ditinjau melalui terpenuhinya indikator sumber daya yang memadai sebagai pelaksana program, pemahaman masyarakat sendiri atas meningkatnya mutu hidup yang jadi tugas bersama bukan hanya pemerintah serta sokongan masyarakat atas berhasilnya program. Keterbukaan masyarakat serta tingkat andil yang tinggi jadi faktor yang mendukung keberhasilan program. Situasi pandemik Covid-19 jadi hal yang menghambat sehingga membuat aktivitas pelatihan serta sosialisasi rutin dihentikan. Usaha yang dikerjakan supaya program ini tetap berlangsung ialah lewat koordinasi bersama Dinas Kesehatan, Gugus Tugas, serta Lembaga terkait guna menyokong pengerjaan program yang adaptif dengan situasi pandemi.
8.	Danu Fitrianto, Eva Kurnia Farhan, 2023	Mengetahui dengan mendalam terkait “Implementasi	Kualitatif Deskriptif	Teori Menurut Jones (1996) menyebutkan bahwa	Tujuan dari program Kampung KB Desa Air Satan guna melakukan peningkatan mutu hidup keluarga (PUS) dan



	(Fitrianto & Farhan, 2023)	Program Kampung KB (Studi Di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas)".		implementasi program terdapat empat aspek yaitu tujuan, kegiatan, aturan dan prosedur, perencanaan anggaran	masyarakat Desa dengan melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan agar masyarakat melakukan KB dengan cara MKJP, Sasaran program Kampung KB di Desa Air Satan keluarga (PUS) dan masyarakat agar masyarakat mahu melakukan KB dengan cara MKJP dan desa-desa kategori desa tertinggal, Program kampung KB yang ada di Desa Air Satan adalah Pokja, kelompok kerja ini meliputi forum musyawarah desa (Musdes) kelompok kegiatan (Pokja) meliputi pembinaan BKB, BKR, BKL, kampung KB di Desa Air Satan selalu dilakukan monitoring langsung oleh DPPKB setiap persemester dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang ada dilaksanakan yang terkait program kampung KB itu sendiri sudah sesuai dan langsung tepat sasaran serta manfaat dari program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9.	Desi Ariani, 2020 (Ariani, 2020)	Mengetahui dan mengkaji secara jelas tentang penerapan program Kampung KB pada Desa Percut, Deli Serdang	Kualitatif Deskriptif	Indikator mengacu pada pernyataan Donalds S. Van Meter dan Van Horn yakni <i>policy standards and objectives, resource, inter-organizational relations, characteristics of executing agent, implementor's disposition</i>	Pelaksanaan Program Kampung KB belum bekerja dengan baik, hal ini terlihat dari pengerjaan program ini yaitu no lagi bekerja dan masih banyak kurang dari berbagai macamnya indikator termasuk sumber daya, hubungan antar organisasi, serta disposisi pelaksana. Saran pada penelitian ini adalah perlu mencari solusi dengan melaksanakan program Kampung KB di mengaktifkan kembali program dan melakukan peningkatan pada fasilitas, relasi

					antara organisasi serta disposisi pelaksanaannya lebih baik
10.	Faizal Rianto , Neng Suryanti Nengsih, Rendra Setyadiharja, 2019 (Rianto et al., 2019)	Mengevaluasi program Kampung KB di Kota Tanjungpinang	Kualitatif Deskriptif	Konsep <i>Input</i> , Proses, dan <i>Output</i>	Kerjasama lintas sektoral yang terbangun meskipun masih ada batas pada berbagai aspek lintas sektoral tertentu. Satu di antara tantangan Program Kampung KB ialah kurangnya sokongan anggaran. Keengganan masyarakat guna jadi kader Kampung KB pada PPKBD/Sub-PPKBD atau terlibat pada POKJA Kampung KB, bisa diatribusikan dalam kurangnya insentif atau stimulan finansial yang disediakan bagi para kader Kampung KB. Disamping itu, tantangan lain ialah pada wujud sarana operasional seperti bangunan sekretariat Kampung KB yang meskipun tersedia tiap-tiap Kampung KB, Kampung KB yang menumpang pada bangunan lain seperti POSYANDU, POLINDES, Balai Penyuluhan, atau bangunan lainnya.

**Sumber: Peneliti**

Berdasarkan penelitian terdahulu, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perbedaan fokus, lokasi, capaian program, latar belakang program Kampung KB, dan teori dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan dengan fokus lain seperti implementasi dan evaluasi. Capaian program pada penelitian sebelumnya adalah MKJP, partisipasi masyarakat, dan efektivitas program Kampung KB. Latar belakang pada penelitian sebelumnya adalah penerapan program Kampung KB yang belum baik, sehingga adanya analisis untuk mengevaluasi penerapan program Kampung KB. Teori yang digunakan penelitian

sebelumnya juga berbeda dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya memakai teori konsep input, proses, dan output.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis kinerja program Kampung KB Pondok Kelapa, kinerja program adalah sebuah konsep dengan menggabungkan teori implementasi dan evaluasi. Lokasi penelitian ini adalah program Kampung KB Pondok Kelapa, program Kampung KB Pondok Kelapa adalah program Kampung KB yang berdiri pertama di Kecamatan Duren Sawit, sehingga program Kampung KB Pondok Kelapa menjadi sebuah contoh untuk Kelurahan yang berada di Kecamatan Duren Sawit. Kebaharuan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah dari segi penganalisisan kinerja program pada Kampung KB Pondok Kelapa, yang dimana program Kampung KB Pondok Kelapa menjadi program Kampung KB pertama yang berada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana dampak atau hasil dari program Kampung KB Pondok Kelapa, sehingga menjadi salah satu bentuk metode pelatihan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah pada program Kampung KB Pondok Kelapa.

## **1.7 Tinjauan Teori**

### **1.7.1 Administrasi Publik**

Ada tiga arti yang pokok dan mendasar pada pengembangan definisinya:

1. *Administration of public*, menunjukkan kinerja pemerintah dalam berperan sebagai pihak yang berkuasa dan sebagai pihak pengendali,

selalu ikut serta dalam pengaturan serta pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, masyarakat dianggap tidak aktif dan tidak bersuara.

2. *Administration for public*, menunjukkan konsep yang sudah lebih baik, aparat-aparat pemerintahan banyak menjalankan tugasnya melayani masyarakat (penyedia layanan). Aparat pemerintah sangat merespon dan tanggap dalam menanggapi kebutuhan rakyat serta banyak memahami tentang apa yang bisa dilakukan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.
3. *Administration by public*, adalah sebuah konteks yang lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, mengedepankan sikap kompeten dan mandiri. Dalam konteks ini, program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat menitikberatkan pada empowerment yakni aparatur pemerintahan berusaha menjadi fasilitator bagi masyarakat agar dapat mengatur kehidupannya dengan tidak selalu menggantungkan kehidupannya pada pemerintahan. (Mustanir et al., 2023)

Administrasi publik dapat dianggap sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat (publik). Administrasi publik dipergunakan guna lebih memahami relasi ini serta bisa memberi peningkatan akuntabilitas kebijakan publik atas efektivitas serta efisiensinya pelaksanaannya. Pada saat mengembangkan administrasi public, perhatian wajib diberikan pada faktor lingkungan yang bisa memberi pengaruh pada berhasilnya atau kelangsungan kawasan yang dikelola, faktor lingkungan mempunyai

pengaruh besar terhadap perkembangan administrasi publik, terutama dari lingkungan eksternal. (Malawat, 2022)

Terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup administrasi publik menurut (Pasolong, 2019), diantara sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik

Serangkaian perilaku berdasar hasil analisis pada alternative-alternatif yang diberikan ialah suatu definisi kebijakan. Pilihan tersebut berkenaan dengan berbagai macam opsi yang nantinya opsi terbaik diputuskan guna dikerjakan dengan cara yang berpihak pada kepentingan publik. Proses kebijakan publik mencakup analisis, perumusan, persetujuan, penerapan serta evaluasi kebijakan.

2. Birokrasi Publik

Birokrasi pada dasarnya adalah suatu organisasi pemerintahan pada pusat maupun daerah yang tugas pokoknya ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

3. Manajemen Publik

Manajemen publik berkaitan dengan fungsi manajemen yang jadi tanggung jawab manajer publik, khususnya yang mana mencakup fungsi manajemen kebijakan, manajemen SDM, manajemen keuangan, sistem informasi, serta relasi masyarakat.

4. Kepemimpinan

Kepemimpinan melibatkan berbagai konsep yang berkaitan erat kaitannya akan pemimpin, persyaratan kepemimpinan, karakteristik

khusus pemimpin yang baik, tugas serta fungsi kepemimpinan, serta jenis dan gaya kepemimpinan.

5. Pelayanan Publik

Pelayanan publik berkaitan dengan mutu dari layanan tersebut beserta kriterianya maupun tingkat puas penerima manfaat layanan.

6. Administrasi Kepegawaian Negara

Administrasi kepegawaian negara erat kaitannya akan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya pengaturan dan penyelenggaraan kebijakan publik untuk masyarakat lapisan masyarakat. Ruang lingkup penerapannya yakni pada rekrutmen PNS (perencanaan kebutuhan pegawai, analisis dan persyaratan jabatan, pelatihan, rekrutmen pegawai, pengangkatan PNS, klasifikasi, serta pemberhentian PNS), sistem remunerasi, evaluasi prestasi kerja, jenjang jabatan, diklat PNS, dan pemberhentian maupun pensiun pegawai.

7. Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja menganggap pengukuran kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen berbasis kinerja sebab merupakan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang sangat esensial.

8. Etika Administrasi Publik

Etika adalah pada kode etik yang mewakili moral dan kualitas para administrator publik.

9. *Good Governance*

*Good governance* sektor publik yang baik berfokus di pencapaian prinsip beserta aspek dari tata kelola pemerintahan yang baik pada sebuah negara.

Ruang lingkup administrasi publik penelitian ini masuk dalam kategori manajemen kinerja, dikarenakan penelitian ini membahas tentang hasil sebuah program melalui variabel-variabel yang mendukung tercapainya hasil sebuah program, yaitu anggaran, input, proses, output, outcome, dampak, dan manfaat.

### **1.7.2 Paradigma Administrasi Publik**

Perkembangan paradigma administrasi publik dibagi menjadi lima yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), dan *Governance* (Djani, 2020). Pertama, ciri utama OPA adalah memperkuat pemisahannya dari politik serta mendukung manajemen ilmiah, sedangkan kelemahannya ialah administrasi publik tak memainkan peran besar pada saat pembuatan kebijakan publik. Kedua, dalam model NPA, efisiensi administrasi publik tak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, serta efektivitas, namun turut pada nilai keadilan sosial. Ketiga, NPM mempunyai karakteristik yakni lebih memusatkan fokus pada hasil, perubahan birokrasi bercirikan lebih fleksibel serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mempunyai target yang jelas, pemerintah mempunyai fungsi sebagai memberikan arahan serta fasilitas daripada melakukan layanan publik dengan langsung, dan condong mereduksi

pengelolaan pemerintahan lewat privatisasi. Keempat, NPS melakukan kritisi prinsip yang dikembangkan oleh NPM, bahwa pemerintahan tidak boleh dikerjakan menurut cara komersial, tetapi wajib dijalankan dengan tata cara demokratis. NPS mempunyai sejumlah prinsip yakni, melakukan layanan pada warga negara bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik sebagai fondasi, nilai-nilai warga negara lebih tinggi dibanding nilai pelanggan, bertindak strategis serta demokratis, proses akuntabilitas, fokus melayani dengan sepenuh hati. (George et al., 2016). Rondinelli memaparkan perkembangan terkini administrasi publik ditinjau dari paradigma kelima yakni pemerintahan yang baik atau good governance, perkembangan gagasan turut serta dalam supermasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi terhadap konsensus, keadilan efektivitas serta efisiensi akuntabilitas beserta visi strategis. (Rondinelli, 2007).

### **1.7.3 *New Public Management***

Manajemen kinerja atau manajemen berbasis kinerja adalah sebuah proses dalam rangka memperbaiki kinerja menggunakan langkah-langkah yang terencana dengan baik, sehingga kinerja tersebut dapat menjadi baik dan benar. Menurut (Mahmudi, 2019), mengemukakan bahwa manajemen berbasis kinerja adalah proses perbaikan kinerja melalui proses jangka panjang dan bukan jangka pendek, dan fokus perhatian manajemen kinerja adalah hasil dari sebuah program, sehingga adanya pengukuran kinerja organisasi dalam sebuah program. Sedangkan menurut (Rumawas, 2021), mengatakan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses pengelolaan



sumber daya dengan berorientasi kepada peningkatan kinerja secara strategis melalui hasil kerja yang dicapai untuk kemajuan tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses perbaikan kinerja atau hasil melalui proses jangka panjang dengan berorientasi kepada peningkatan kinerja secara strategis untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

Perkembangan paradigma administrasi publik yaitu *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), *New Public Service* (NPS), dan *Governance*, penelitian ini termasuk kedalam perkembangan paradigma administrasi publik yang ke tiga yaitu NPM atau *New Public Management*. Menurut (Mahmudi, 2019), mengatakan bahwa NPM adalah sebuah konsep manajemen yang memiliki desentralisasi atas pengawasan atau *controlling*, hal tersebut adalah perbandingan antara praktik manajemen sektor swasta lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik, sehingga fokus dari NPM yaitu manajemen sektor publik, dan tidak berfokus pada kebijakan.

Berdasarkan ruang lingkup dan paradigma administrasi publik, peneliti mendapat keterkaitan antara administrasi publik dengan kinerja program. Dalam manajemen kinerja dalam ruang lingkup administrasi publik dijelaskan bahwa manajemen kinerja adalah sebuah proses perbaikan kinerja atau hasil melalui proses jangka panjang untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, selain itu NPM juga dijelaskan dengan sebuah konsep manajemen yang berfokus kepada hasil sebuah program, pada kinerja

program, fokus utama kinerja adalah hasil dari sebuah program dengan menganalisis variabel-variabel pendukung hasil dari sebuah program, seperti input, proses, output, outcome, dampak, dan manfaat.

#### **1.7.4 Kinerja Program**

##### **1.7.4.1 Pengertian Kinerja Program**

Kinerja adalah sebuah kegiatan yang menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksanaan dari sebuah kegiatan/program/kebijakan dalam mencapai suatu tujuan organisasi dalam mengukur kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang berada dalam sebuah organisasi.

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran sejauh mana tercapainya pengerjaan sebuah aktivitas/program/kebijakan pada mencapai sasaran, tujuan, misi serta visi organisasi yang di mana termaktub pada perencanaan strategis sebuah organisasi (Mahsun, 2013). Definisi tersebut menjelaskan bahwa kinerja ialah sebuah alat untuk mengukur sebuah program yang dilaksanakan oleh organisasi publik.

Pengertian kinerja juga dikemukakan oleh Otley dalam (Mahmudi, 2019) yang mengatakan kinerja merujuk pada sesuatu yang memiliki kaitan akan aktivitas mengerjakan suatu pekerjaan, termasuk pada hal yang mencakup hasil yang diraih dalam kerja tersebut. Hal tersebut menjelaskan bahwa kinerja mengukur

bagaimana kualitas atau kuantitas dalam proses menjalankan program.

Program adalah suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi publik maupun swasta yang dijalankan dengan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelaksanaan program terjadi dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang artinya bahwa program dilaksanakan dengan melibatkan sekelompok orang atau individu. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2018) menjelaskan bahwa jika program berkaitan dengan evaluasi, sehingga program diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan pelaksanaan dari sebuah kebijakan, yang sedang bekerja dengan berkesinambungan serta terjadi pada sebuah organisasi yang di mana mengikut sertakan partisipasi individu.

Dari berbagai definisi mengacu pada pernyataan para ahli yang dijabarkan sebelumnya maka bisa ditarik simpulan bahwasanya kinerja program ialah sebuah alat yang digunakan untuk memanajemen hasil daripada sebuah program dengan mengukur bagaimana kualitas maupun kuantitas faktor yang mempengaruhi sebuah organisasi dalam menjalankan program.

#### **1.7.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Program**

Pendapat dari (Arsenia, 2011) mengatakan bahwa terdapat enam tujuan umum pengukuran kinerja yaitu:

1. Tetapkan tujuan yang bisa diterima oleh orang-orang yang kinerjanya akan diukur serta dikerjakan pada situasi yang ditandai dengan komunikasi terbuka antara atasan serta bawahan serta pencarian kesatuan pada tindakan.
2. Mempergunakan ukuran keberhasilan yang bisa diandalkan, terbuka, serta objektif, melakukan perbandingan pada kinerja actual dengan kinerja yang sesungguhnya, serta memberikan umpan balik kepada kinerja yang sedang dievaluasi.
3. Jika prestasi tidak optimal, sesudah mengambil beberapa langkah sebelumnya, perlu guna mengidentifikasi serta menyetujui adanya rencana pengembangan pribadi orang yang dinilai, yang bisa didasari pada penilaian kebutuhan pelatihan serta pengembangan.
4. Pembuatan ketentuan guna alokasi baik hadiah ekstrinsik yang diatur oleh proses evaluasi.
5. Memberi janji akan berbagi hasil yang diinginkan berupa pengembangan karyawan, pemanfaatan kemampuan individu secara maksimal, perubahan budaya perusahaan, serta pencapaian tujuan organisasi pada situasi yang mana terdapat keselarasan pada tujuan individu serta organisasi.
6. Menyadari bahwa manajemen kinerja terdapat di jantung proses manajemen umum.

Terdapat beberapa ahli yang menyebutkan tujuan pengukuran kinerja sektor publik, diantaranya yaitu (Mahmudi, 2019) menyebutkan bahwa ada enam tujuan pengukuran kinerja sektor publik yakni:

1. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
2. Memberikan fasilitas pembelajaran kepada pegawai
3. Melakukan perbaikan dari periode sebelumnya
4. Memberi pertimbangan yang sistematis pada pengambilan keputusan mengenai *reward* serta *punishment*
5. Memberi motivasi pegawai
6. Melakukan penciptaan akuntabilitas publik

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018), mengatakan ada lima tujuan pengukuran kinerja sektor publik yakni:

- a) Strategi komunikasi yang lebih baik (top down and bottom up).
- b) Melakukan pengukuran kinerja keuangan serta non-keuangan dengan seimbang yang mana kemajuan dalam mencapai perkembangan pencapaian strategi dapat ditelusuri.
- c) Mandorong pemahaman akan kepentingan manajer tingkat menengah serta manajer bawah dan mendorong maupun meraih tujuan.
- d) Merupakan alat guna meraih kepuasan berdasar pada pendekatan individual serta kemampuan kolektif yang wajar.

e) Melakukan penciptaan akuntabilitas publik, pengukuran kinerja ialah satu di antara alat guna memacu diciptakannya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja mempertunjukkan tingkat efisien kinerja manajerial dicapai, kualitas kegiatan keuangan organisasi serta kegiatan lainnya sebagai dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja ini wajib dilakukan pengukuran serta pelaporan sebagai bentuk laporan kinerja.

Beberapa penjelasan para ahli diatas bisa ditarik simpulan bahwasanya tujuan pengukuran kinerja program ialah menciptakan hasil yang selaras akan tujuan program atau organisasi melalui berbagai cara dalam memajukan dan memotivasi individu, tim, hingga organisasi tersebut.

#### **1.7.4.3 Indikator Kinerja Program**

Indikator kinerja yang dikemukakan oleh (Mahsun, 2013) terdapat enam indikator yang dipergunakan guna melakukan pengukuran kinerja yaitu:

1. Indikator Input (masukan) ialah semuanya yang saling berhubungan sehingga pengerjaan kegiatan bisa meraih keluaran atau hasil, yakni mencakup tersedianya SDM yang kompeten berdasar pada peraturan serta perundang-undangan, selain itu adanya anggaran atau belanja akan digunakan untuk membantu tujuan serta sasaran kegiatan bisa dicapai serta mendapat manfaat untuk kehidupan masyarakat.

2. Indikator Process (Proses), skala kegiatan, baik daripada segi kecepatan, ketepatan, maupun ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta motivasi sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan, serta metode-metode yang digunakan.
3. Indikator Output (Keluaran), sesuatu yang perlu dicapai secara langsung dari suatu aktivitas, misalnya masyarakat atau komunitas memahami motivasi dan tujuan dilakukan kegiatan pemberdayaan.
4. Indikator Outcome (Hasil), sesuatu yang mencerminkan fungsi kinerja serta bekerja untuk mencapai transparansi maupun akuntabilitas pada saat melaksanakan pembangunan desa.
5. Indikator Benefit (Manfaat), sesuatu yang berkaitan akan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh pemerintah desa
6. Indikator Impact (Pengaruh atau Dampak), dampak yang diterima masyarakat, yang mencakup kemampuan masyarakat guna ikut andil pada pembangunan desa

Menurut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020) pengukuran kinerja ialah sebuah proses evaluasi bertahap yang sistematis serta berkesinambungan guna mengevaluasi tingkat berhasilnya pelaksanaan kegiatan seturut program serta kebijakan guna meraih tujuan serta sasaran yang sudah ditentukan untuk

mencapai visi serta misi serta mengukur atas hasil (*outcome*) daripada sebuah program serta keluaran (*output*) daripada sebuah aktivitas. Indikator kinerja program ialah alat untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai hasil (*outcome*) daripada sebuah program. (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2019).

Pengukuran *outcome* atau hasil tidak dapat dilakukan kalau tidak melihat beberapa aspek-aspek sebelumnya seperti *output* dan *input*, sehingga pengukuran kinerja program dapat dilakukan dengan metode yang bernama *Value for Money*. *Value for Money* adalah sebuah penilaian dan pengukuran sektor publik berdasar pada berhasilnya program yang berfokus pada tiga elemen yakni ekonomi, efisiensi, serta efektivitas. Metode *Value for Money* tidak berpacu dalam finansial saja, tetapi juga dapat berfokus pada non-finansial, yaitu pada penilaian kualitas pelayanan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) pada bukunya "Akuntansi Sektor Publik" mengatakan indikator-indikator pengukuran Value for Money ialah

a. Pengukuran Ekonomi.

Pengukuran efektivitas hanya memperhitungkan hasil yang diperoleh, sementara tindakan ekonomi hanya memperhitungkan input yang dipakai.



b. Pengukuran Efisiensi.

Efisiensi ialah aspek esensial daripada ketiga tema bahasan Value for Money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output terhadap input. Makin tinggi output dibandingkan input, maka makin tinggi pula tingkat efisiensi sebuah organisasi.

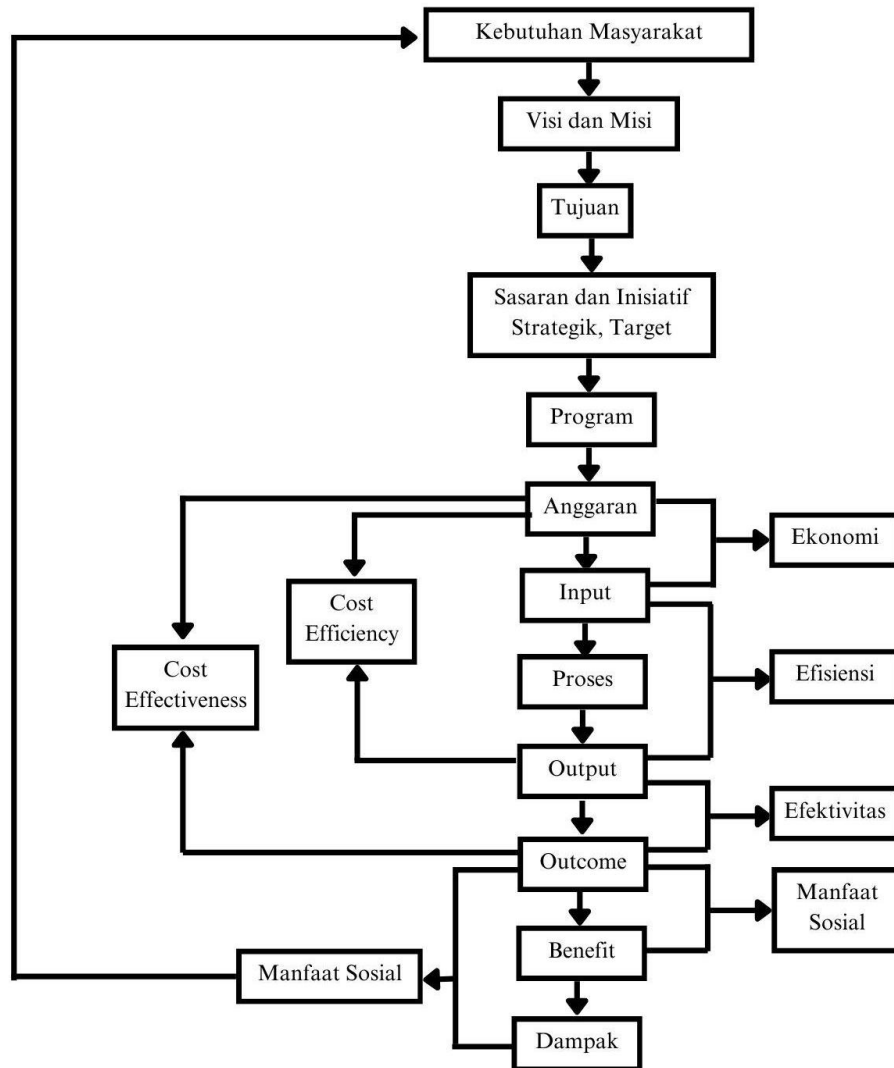
c. Pengukuran Efektivitas.

Efektivitas ialah parameter apakah sebuah organisasi meraih tujuannya atau tidak. Jika sebuah organisasi berhasil meraih tujuannya, maka organisasi tersebut disebut beroperasi secara efektif. Hal paling esensial, efektivitas tak menentukan terkait berapa besar biaya yang sudah diperlukan guna meraih tujuan tersebut. Biaya mungkin melebihi dari yang sudah perkiraan dianggarkan, dapat pula dua kali lebih besar dari apa yang sudah dianggarkan. Efektivitas hanya meninjau apakah sebuah program atau kegiatan sudah meraih target yang sudah ditentukan.

d. Pengukuran Outcome.

Outcome atau hasil ialah pengaruh sebuah program atau proyek pada masyarakat. Outcome mempunyai nilai lebih tinggi dibanding output, sebab output hanya melakukan pengukuran pada hasil serta tidak ada dampak pada masyarakat, sementara outcome melakukan pengukuran pada mutu output serta pengaruhnya.

Adapun kerangka manajemen kinerja sektor publik menurut (Mahmudi, 2019), kerangka sebagai berikut:



**Gambar 6 Kerangka Pengukuran Kinerja Sektor Publik, sumber: Mahmudi (2019), 96**

Melalui gambar diatas, penelitian ini memakai indikator kinerja program yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019) pada bukunya yang bertajuk “Manajemen Kinerja Sektor Publik” mengatakan indikator kinerja program ialah

1. *Cost of Input* atau Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah perbandingan antara *cost per input* atau *input per cost*. Relativitas konsep ekonomi dipengaruhi oleh faktor lokasi dan waktu.

## 2. Efisiensi atau Produktivitas

Efisiensi adalah sebuah perbandingan antara *output per input* atau *input per output*. Efisiensi memiliki kaitan akan relasi antara *output* mencakup barang atau pelayanan yang diproduksi oleh sumber daya yang dipergunakan guna memproduksi *output*.

## 3. Efektivitas

Efektivitas adalah sebuah perbandingan antara *outcome* dengan *output* dan *output* dengan *outcome*. Makin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, makin efektif sebuah organisasi, program, atau kegiatan.

## 4. *Net Social Benefit* atau Manfaat untuk sosial

Manfaat untuk sosial adalah sebuah pengukuran hasil *outcome* dalam sebuah organisasi, program, atau kegiatan. Pengukurannya dapat dilakukan dari perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh organisasi, program, atau kegiatan.

### **1.7.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Program**

Didalam menjalankan sebuah program atau kegiatan pasti adanya faktor yang menghambat untuk pelaksanaannya, seperti sumber daya yang kurang, partisipasi masyarakatnya, dan lain sebagainya yang menyebabkan

program menjadi tidak berhasil, dan harus adanya pengukuran faktor penghambat program untuk menjawab bagaimana keberhasilan sebuah program.

Seperti penjelasan diatas, menurut Edwards III dalam (Indihono, 2009) mengatakan bahwa pada empat faktor yang memberi pengaruh pada keterhambatan suatu program yakni komunikasi, sumber daya, serta struktur birokrasi.

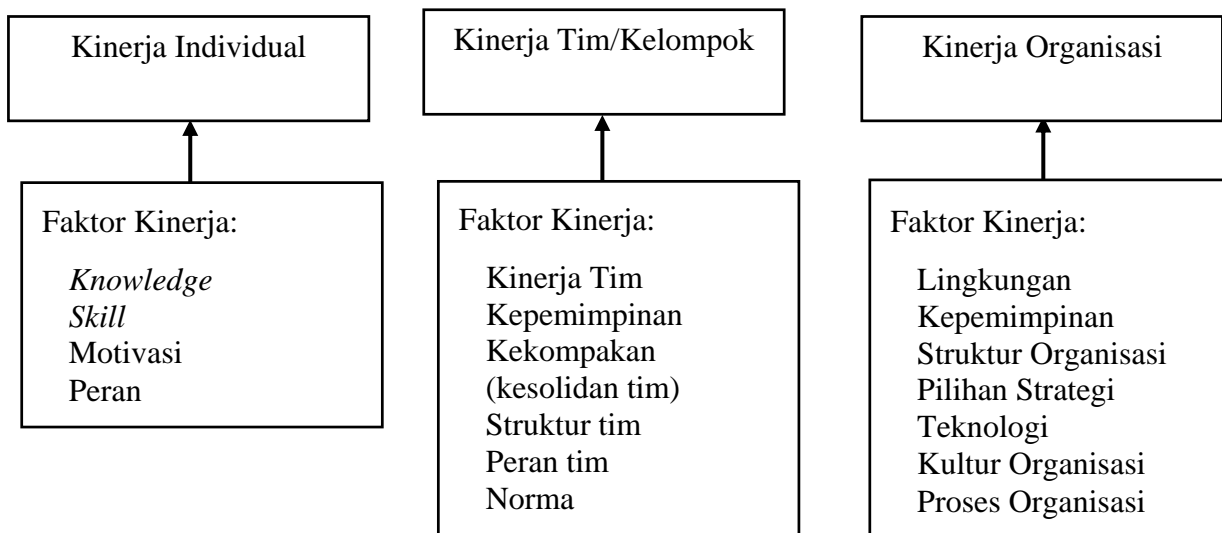
- Komunikasi, sebuah program harus adanya komunikasi yang efektif dalam pengkomunikasian antara pelaksana dengan kelompok sasaran, sehingga mengurangi tingkat penolakan serta kekeliruan pada saat melakukan aplikasi program.
- Sumber daya, sumber daya dalam sebuah program harus memadai dan cukup untuk melakukan kegiatan sebuah program, tidak hanya sumber daya manusia namun turut sumber daya keuangan, sehingga adanya penyediaan fasilitas yang ditujukan untuk para kelompok sasaran dan kelompok sasaran akan menjadi percaya kepada program yang dijalankan
- Struktur birokrasi, mekanisme pelaksanaan program biasanya telah ditentukan lewat Standard Operating Procedure (SOP) yang termaktub pada program, SOP yang baik dicantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, serta mudah dipahami

BKKBN mempunyai sebuah program yaitu Kampung KB, menurut (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara, 2017) terdapat lima faktor keberhasilan Program Kampung KB yaitu:

1. Komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan pada seluruh tingkatan  
Faktor ini mengukur bagaimana komitmen dari para pemangku kebijakan dari semua tingkatan seperti kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, hingga RT serta RW.
2. Integrasi Lintas Sektor  
Sebuah program memiliki kegiatan yang berkategori dari sasaran kegiatan, sehingga sebuah program tidak hanya berfokus pada satu sektor tetapi beberapa sektor yang dapat digabung menjadi satu program.
3. Optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja  
Faktor ini mengukur bagaimana fasilitas yang diberikan oleh sebuah program, contohnya seperti sarana dan prasarana, kegiatan, penyuluhan, dan lain-lain.
4. Semangat serta dedikasi kelola program, termasuk petugas lini lapangan  
Faktor ini mengatur bagaimana kinerja setiap pegawai atau anggota yang bertugas dalam mengembangkan, mengelola, dan penggerak dari sebuah program.
5. Partisipasi aktif masyarakat

Faktor ini mengukur bagaimana hasil partisipasi masyarakat berdasarkan input dari sebuah program, seperti sumber daya manusia, sumber dana, teknologi, metode, dan lain-lain.

Penjelasan lengkap mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik yang dipengaruhi oleh faktor internal sebuah program mengambil konsep yang diberikan oleh (Mahmudi, 2019), menjelaskan bahwa individu mendapat pengaruh oleh sejumlah faktor, khususnya pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi, serta peran. Sementara itu, kinerja tim mendapat pengaruh oleh beberapa faktor seperti kohesi tim, kemampuan kepemimpinan tim, kekompakan dalam tim, struktur tim, tingkat besar peran tim, serta norma dalam tim. Selain faktor lingkungan, terdapat faktor lain yang memberi pengaruh pada kinerja suatu organisasi, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, strategi yang dipilih, sokongan teknologi, budaya organisasi, serta proses organisasi. (Mahmudi, 2019)



**Gambar 7 Pengaruh Kinerja Individu, Kelompok, Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik, sumber: Mahmudi,2019:20**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah program, faktor tersebut dapat dipengaruhi dari kondisi internal sebuah program yaitu organisasi atau instansi. Faktor penghambat sebuah program dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang bekerja yaitu pegawai, menurut Simanjuntak dalam (Rumawas, 2021), berpendapat bahwa kapasitas pribadi adalah kesanggupan atau kesanggupan dalam melakukan pekerjaan. Kapasitas pribadi memberi pengaruh oleh berbagai faktor yang bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Kompetensi serta keterampilan profesional
- b. Motivasi dan etos kerja

Selain kemampuan pegawai, untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari sebuah program, hal yang terpenting adalah adanya kelompok kerja yang memiliki anggota perwakilan perangkat desa, petugas kesehatan desa, perwakilan komunitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Keberadaan kelompok kerja ini esensial sebab mereka yang akan membimbing, mengelola, serta penggerak kegiatan pada lapangan. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Negara, 2017)

Kinerja individu juga bergantung pada sokongan organisasi berupa wujud pengorganisasian, penyediaan sarana serta prasarana kerja, pilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja serta kondisi dan syarat kerja. Tujuan pengorganisasian adalah guna memberi kejelasan kepada tiap unit kerja serta tiap orang terkait tujuan yang perlu diraih serta apa yang perlu dikerjakan guna meraih tujuan tersebut. Tiap orang wajib mempunyai serta melakukan pemahaman deskripsi pekerjaan yang jelas. (Rumawas, 2021)

Penjelasan menurut para ahli diatas tentang faktor yang mempengaruhi kinerja program dikatakan juga oleh (Mahmudi, 2019) mengatakan bahwa ada lima faktor yang memberi pengaruh kinerja, sehingga penelitian ini memakai teori tersebut untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kinerja program yakni:

1. Faktor individu yaitu mencakup pengetahuan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, serta komitmen.
2. Faktor kepemimpinan yaitu mencakup mutu motivasi, kualitas arahan, kualitas dukungan, dan kualitas kerja manajer.
3. Faktor tim yaitu mencakup solidaritas, mutu dukungan serta semangat pada rekan tim, kekompakan tim.



4. Faktor sistem yaitu mencakup sistem kerja, fasilitas kerja, teknologi, proses organisasi, serta kultur kinerja organisasi.
5. Faktor kontekstual yaitu mencakup tekanan serta perubahan yang berada dalam lingkungan eksternal maupun internal.

## **1.8 Operasional Konsep**

### **1.8.1 Kinerja Program**

Dalam menjawab rumusan permasalahan pertama peneliti menggunakan fenomena kinerja program. Kinerja program adalah sebuah alat yang digunakan untuk manajemen hasil dari sebuah program dengan mengukur bagaimana kualitas serta kuantitas faktor yang mempengaruhi sebuah organisasi dalam menjalankan program. Adanya pengukuran kinerja program berdasarkan indikator kinerja menurut (Mahmudi, 2019) ada empat yaitu:

- **Ekonomi**

Ekonomi adalah pengukuran dari rupiah ke input atau input ke rupiah, dalam mengukur indikator ekonomi sebuah program adanya pengukuran pada dimensi input atau rupiah, yaitu sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas kerja.

- **Efisiensi**

Efisiensi adalah pengukuran input ke output atau output ke input, dalam mengukur indikator efisien sebuah program adanya pengukuran pada dimensi input atau output, yaitu jumlah kegiatan,

partisipasi masyarakat, jumlah penerima program, hingga sarana dan prasarana program.

- Efektivitas

Efektivitas adalah pengukuran output ke outcome atau outcome ke output, dalam mengukur indikator efektivitas sebuah program adanya pengukuran pada dimensi output atau outcome, yakni pola waktu, outcome bertingkat, dan dampak populasi yang berbeda.

- *Net Social Benefit*

*Net Social Benefit* atau manfaat sosial adalah pengukuran outcome dalam sebuah program, dalam mengukur manfaat sosial dalam sebuah program adanya pengukuran pada dimensi outcome, yaitu perubahan pada masyarakat sosial, dampak program kepada masyarakat, dan kepuasan masyarakat.

### **1.8.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Program**

Dalam menjawab rumusan permasalahan kedua, peneliti menggunakan fenomena faktor penghambat kinerja program. Adanya pengukuran terhadap faktor-faktor kinerja menurut (Mahmudi, 2019) terdapat lima faktor yaitu yaitu:

- Faktor Individual

Faktor individu dipengaruhi oleh kualitas individu dalam sebuah program, indikator yang mempengaruhi individu adalah pengetahuan, skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen.

- Faktor Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan dipengaruhi oleh kualitas pemimpin atau manajer dalam sebuah program, indikator yang mempengaruhi kualitas pemimpin adalah kualitas motivasi, kualitas arahan, kualitas dukungan, dan kualitas kerja manajer.

- Faktor Tim

Faktor tim dipengaruhi oleh kualitas individu dan pemimpin dalam membentuk sebuah tim dalam program, indikator yang mempengaruhi kualitas tim adalah solidaritas, kualitas dukungan dan semangat pada rekan tim, kekompakan tim.

- Faktor Sistem

Faktor sistem dipengaruhi oleh kualitas organisasi dalam menjalankan sebuah program, indikator yang mempengaruhi kualitas organisasi adalah sistem kerja, fasilitas kerja, teknologi, proses organisasi, dan kultur kinerja organisasi.

- Faktor kontekstual

Faktor kontekstual dipengaruhi oleh tekanan serta perubahan yang berada dalam lingkungan eksternal maupun internal sebuah organisasi.

**Tabel 3 Tabel Fenomena Penelitian**

FOKUS		FENOMENA	SUB FENOMENA	PERTANYAAN	1	2	3	4
Kinerja Kampung Kelurahan Kelapa	Program KB Pondok	Ekonomi	Anggaran	Bagaimana kualitas pengelolaan anggaran dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
			Sumber Daya Manusia	Bagaimana kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh anggaran program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓		✓	✓
			Fasilitas Kerja	Bagaimana kualitas dan kuantitas fasilitas kerja program yang dipengaruhi oleh anggaran program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
		Efisiensi	Kegiatan Program	Bagaimana jumlah kegiatan yang berada dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?		✓	✓	✓
			Partisipasi Masyarakat	Bagaimana jumlah partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?		✓	✓	✓

	Efektivitas	Dampak Waktu	Bagaimana dampak dari waktu ke waktu dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
		Dampak Populasi	Bagaimana perbedaan dampak pada populasi yang berbeda diluar program Kampung KB Pondok Kelapa?		✓	✓	✓
		Prioritas Tujuan	Bagaimana prioritas tujuan dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
	Manfaat Sosial	Manfaat program	Bagaimana dampak dan manfaat program Kampung KB Pondok Kelapa untuk masyarakat Kelurahan Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	✓
Faktor Pendorong Kinerja Program Kampung KB Pondok Kelapa	Faktor Individu	Keterampilan	Bagaimana keterampilan anggota pengelola program dalam menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
	Faktor Kepemimpinan	Kualitas Pemimpin	Bagaimana kualitas kerja pemimpin atau manajer dalam memberi motivasi dan dukungan dalam program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	

	Faktor Sistem	Fasilitas Kerja	Bagaimana kualitas fasilitas kerja yang disediakan untuk menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
		Proses Organisasi	Bagaimana proses organisasi dalam menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
Faktor Penghambat Kinerja Program Kampung KB Pondok Kelapa	Faktor Individual	Pengetahuan	Bagaimana pengetahuan anggota pengelola program dalam menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	✓
	Faktor Tim	Kekompakan	Bagaimana kekompakan individu membentuk tim dalam menjalankan kegiatan program Kampung KB Pondok Kelapa?		✓	✓	✓
		Dorongan Kepada Rekan	Bagaimana individu dan pemimpin dalam memberi dukungan kepada rekan kerja untuk menjalankan program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	
	Faktor Kontektual	Tekanan internal dan eksternal	Bagaimana tekanan dan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal organisasi program Kampung KB Pondok Kelapa?	✓	✓	✓	✓

**Keterangan**

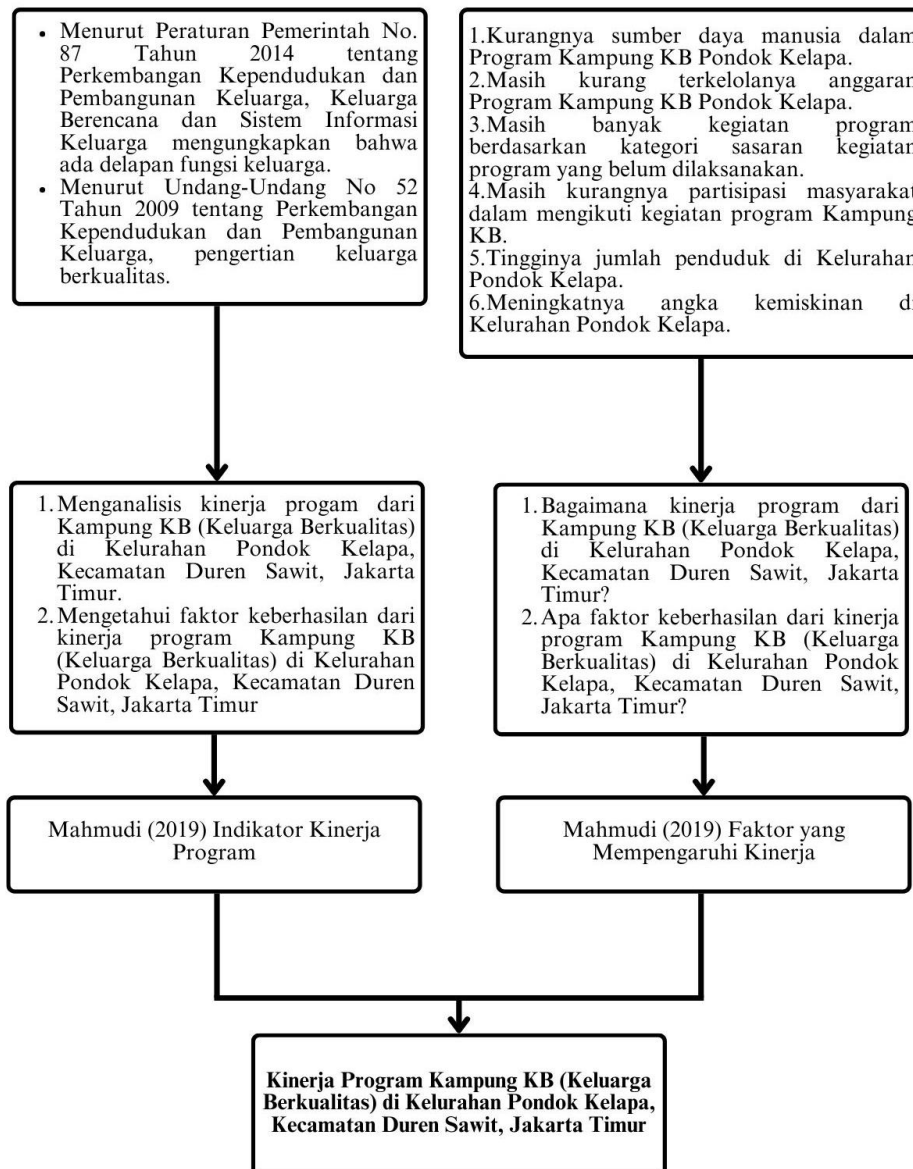
1= Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sudin PPAPP Jakarta Timur

2= Kepala Pengelola Program Kampung KB Pondok Kelapa

3= Pengelola Program Kampung KB Pondok Kelapa

4= Perwakilan masyarakat Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa

## 1.9 Kerangka Pikir Penelitian





## 1.10 Argumen Penelitian

Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas adalah sebuah program yang dibentuk oleh BKKBN, program tersebut ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia Indonesia pada bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga agama di dalam tingkatan kelurahan, desa, atau setingkatnya. Kampung KB dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terkait Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga yang bermutu dapat berupa keluarga yang dibentuk berdasar pada perkawinan yang substansial serta memiliki ciri sejahtera, kokoh, maju, merdeka, mempunyai anak yang sempurna, maju -berpikir, dapat diandalkan, selaras, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 terkait Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga, dan Sistem Informasi Keluarga mengungkapkan terdapat delapan fungsi keluarga, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang Kampung KB, penelitian ini berfokus pada program Kampung KB pada Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Didalamnya masih banyak terdapat permasalahan yang membuat program Kampung KB Pondok Kelapa menjadi terhambat diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia pada program Kampung KB Pondok Kelapa, kurang terkelolanya anggaran program Kampung KB Pondok Kelapa, masih banyak kegiatan menurut sasaran program yang masih belum terlaksanakan, masih kurangnya partisipasi masyarakat yang

mengikuti kegiatan program Pondok Kelapa, meningkatnya jumlah penduduk di Kelurahan Pondok Kelapa, meningkatnya jumlah kemiskinan penduduk di Kelurahan Pondok Kelapa, manfaat program Kampung KB Pondok Kelapa untuk masyarakat sekitar masih kurang bermanfaat.

Melihat permasalahan-permasalahan yang berada dalam program Kampung KB Pondok Kelapa, peneliti menjawab dengan sebuah teori yang mengukur bagaimana hasil sebuah program yang dijalankan organisasi yaitu dengan teori pengukuran kinerja *Value for Money* menurut (Mahmudi, 2019), yang mengatakan bahwa terdapat empat indikator kinerja, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan manfaat sosial. Ekonomi adalah pengukuran dari uang ke input atau input ke uang, dalam program Kampung KB Pondok Kelapa terdapat permasalahan tentang uang ke input yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola program, padahal sudah adanya pelatihan kepada anggota Pokja yang mengelola program Kampung KB Pondok Kelapa, ditambah lagi kurang terkelolanya anggaran di program Kampung KB Pondok Kelapa, hal tersebut bisa diketahui dari salah satu anggota pengelola program Kampung KB Pondok Kelapa yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui berapa anggaran yang diberikan untuk Kampung KB Pondok Kelapa.

Efisiensi adalah pengukuran dari input ke output atau output ke input, dalam program Kampung KB Pondok Kelapa terdapat permasalahan input ke output yaitu masih banyak kegiatan menurut sasaran program yang masih belum terlaksanakan, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan anggaran dalam program Kampung KB Pondok Kelapa, ditambah lagi partisipasi masyarakat dalam

mengikuti kegiatan-kegiatan penting yang masih kurang, hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari para pengelola program Kampung KB Pondok Kelapa dalam mensosialisasi kegiatan-kegiatan yang harus diikuti oleh para masyarakat program Kampung KB Pondok Kelapa, hal tersebut mempengaruhi klasifikasi status program yang masih berkembang.

Efektivitas adalah pengukuran output ke outcome atau outcome ke output, dalam program Kampung KB Pondok Kelapa terdapat permasalahan tentang output ke outcome yaitu meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan di Kelurahan Pondok Kelapa, hal tersebut dipengaruhi dengan partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengikuti kegiatan-kegiatan program, apalagi kegiatan yang tentang kependudukan atau perekonomian didalam program Kampung KB Pondok Kelapa. Manfaat sosial adalah pengukuran outcome, dari penjelasan diatas maka outcome yang dihasilkan oleh program Kampung KB masih belum berhasil, dilihat dari kurangnya manfaat yang diberikan oleh program Kampung KB Pondok Kelapa.

## **1.11 Metodologi Penelitian**

### **1.11.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian merupakan cara melakukan penelitian dengan cara menghimpun, melakukan kelola, serta melakukan analisis data dengan sistematis supaya penelitian terlaksanakan dengan efektif maupun efisien seturut akan tujuan program (Tika, 2015). Oleh karena itu, terdapat metode untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, ada dua jenis

metode penelitian yakni kualitatif serta kuantitatif, di dalam penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2020) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode yang dipakai guna mengkaji status objek keilmuan, yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang dimana peneliti sebagai instrumen utamanya, dimana teknik penghimpunan datanya dikerjakan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis datanya adalah hasil induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam melakukan metode penelitian adanya jenis yang dipergunakan untuk sebuah penelitian, jenis penelitian bisa dikategorikan berdasar pada karakteristik fenomena hingga kelompoknya, ada dua tipe penelitian yakni deskriptif serta eksperimental, sedangkan penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2020) ialah suatu metode yang melakukan deskripsi atau memberi ilustrasi mengenai objek yang diteliti berdasar pada data yang didapati. Penelitian deskriptif dapat memakai beberapa metode yang mencakup survei, observasi, wawancara, maupun studi kasus. Penelitian deskriptif tak menekan relasi sebab-akibat tetapi memberi kesempatan pada peneliti guna mempelajari khalayak yang lebih luas.

Dari penjelasan diatas maka tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data

## **“Kinerja Program Kampung KB di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”**

### **1.11.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian akan dikerjakan. Pemilihan lokasi hendaknya didasari pada pertimbangan daya tarik, keunikan, serta keselarasan akan khalayak yang ditentukan. Dengan memilih lokasi ini, peneliti akan menemui berbagai hal baru dan bermakna (Al Muchtar, 2015).

Lokasi dari penelitian ini ialah Pada Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, lebih tepatnya pada Jl. Pondok Kelapa IB No. 1, RT.1/RW.4, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13450.

### **1.11.3 Subjek Penelitian**

Mengacu pada pernyataan (S Arikunto, 2016) subjek penelitian meliputi pengidentifikasian subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang yang dilekatkan, dan yang dipermasalahkan data variable penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, artinya orang yang memberi informasi terkait data yang diinginkan peneliti memiliki kaitan akan penelitian yang sedang dilakukan.

Subjek dari penelitian yang terkait dengan permasalahan Kinerja Program Kampung KB (Keluarga Berkualitas) di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yaitu menganalisis kinerja

dari program Kampung KB di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Peneliti membutuhkan sejumlah informan sehingga melibatkan semua orang yang berperan dalam Program Kampung KB di Pondok Kelapa yaitu, pihak pemerintah seperti kelurahan, BKKBN, dan Dinas Kependudukan, pengurus atau pengelola Program Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa, dan perwakilan warga Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa.

#### **1.11.4 Jenis Data**

(Sujarweni, 2014) menunjukkan bahwa penelitian diklasifikasikan menjadi data kualitatif serta kuantitatif. Data kualitatif dengan sederhana dapat berupa kata atau frasa yang dapat diidentifikasi. Sedangkan data kuantitatif ialah data yang berwujud angka. Peneliti menggunakan data kualitatif, yang dimana data ini terdiri atas teks atau informasi yang disampaikan oleh para narasumber dalam menjelaskan kinerja program Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa.

#### **1.11.5 Sumber Data**

Mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2021) data primer ialah sumber data dengan langsung pada pengumpul data. Data dihimpun langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat pertama dikerjakannya objek penelitian dilakukan. Data primer dikumpulkan dari informan melalui hasil wawancara dengan narasumber. Sumber data primer untuk penelitian ini ialah:

1. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Sudin PPAPP Kota Jakarta Timur

2. Kepala pengelola Kampung KB Pondok Kelapa
3. Pengurus atau pengelola Kampung KB Pondok Kelapa
4. Warga Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa

Menurut (Sugiyono, 2021) data sekunder ialah yang tidak memberi sumber data langsung pada pengumpul data, misal melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder yang didapatkan untuk penelitian ini ialah:

1. Dokumen-dokumen informasi tentang program Kampung KB pada Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Regulasi dari Pemerintah Daerah tentang program Kampung KB pada Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

#### **1.11.6 Teknik Pengumpulan Data**

(Sugiyono, 2021) turut memaparkan bahwa tahap terpenting pada penelitian adalah teknik pengumpulan data, sebab pengumpulan data merupakan tujuan utama dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data bisa dikerjakan dengan memakai teknik observasi, angket, wawancara, dokumentasi atau kombinasi. Sementara pada penelitian ini akan dipergunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni teknik observasi (pengamatan), interview (wawancara), serta dokumentasi.

Menurut (Sugiyono, 2021) menyatakan bahwa, landasan sebuah ilmu pengetahuan adalah observasi, penelitian ini mengobservasi bagaimana kinerja dari sebuah program yaitu Program Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa.

Menurut (Sugiyono, 2021) meyakini bahwa dengan teknik wawancara, maka peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam kepada partisipan dengan menjelaskan situasi serta fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak dapat ditemukan hanya dengan hanya lewat observasi, sehingga penelitian ini memakai teknik wawancara guna mengetahui hal-hal yang tidak dapat dipaparkan jika hanya melakukan observasi.

Dokumen merupakan catatan jejak sebuah peristiwa pada masa lalu. Dokumentasi seringkali berwujud gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berwujud visual, misal foto, benda mati, lukisan, sketsa, serta lainnya. Dokumen tertulis, meliputi catatan harian, kisah hidup, peraturan, kebijakan, dan biografi. Untuk dokumen yang berwujud karya, meliputi karya seni berupa patung, lukisan, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2021), pada penelitian ini peneliti memakai teknik pengumpulan data studi literatur, teknik penghimpun data ini dikerjakan dengan mencari lewat beberapa dokumen esensial yang memiliki hubungan akan gejala yang ditinjau.

#### **1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Mengacu pada pernyataan (Sugiyono, 2020) pada penelitian kualitatif, data bisa didapati melalui beragam sumber, satu diantaranya dengan memakai teknik penghimpunan data yang berbeda-beda (triangulasi), serta dikerjakan dengan terus menerus hingga data meraih titik jenuh.



(Sugiyono, 2020) meyakini bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dikerjakan dengan interaktif serta berlangsung dengan terus menerus hingga selesai, yang mana terjadinya kejenuhan data. Aktivitas pada analisis data, yakni:

1. Pengumpulan data merupakan tujuan utama dari tiap penelitian, khususnya aktivitas pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, sendiri penghimpunan data memakai teknik observasi, wawancara dengan mendalam, serta teknik dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
2. Reduksi data memiliki tujuan guna menyederhanakan, mengklasifikasi serta membuang data-data yang tidak dibutuhkan agar data yang dihasilkan lebih mudah dipahami serta informasinya lebih bermakna, oleh karena itu wajib dilakukan pencatatan dengan cermat serta rinci.
3. Penyajian data adalah penyajian data sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan dihubungkan dengan unsur penelitian kualitatif lainnya. Penyajian data dapat digambarkan pada wujud tabel, uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, bagan, serta lain-lain, tetapi pada umumnya pada penelitian kualitatif, teks yang memiliki sifat naratif ialah yang paling kerap dipergunakan guna memaparkan data. Pada hal ini, peneliti harus memaparkan data pada wujud tertulis. Guna memberi informasi yang jelas mengenai

hasil penelitian, maka bisa disempurnakan dengan menyertakan tabel atau gambar.

4. Menarik suatu kesimpulan merupakan suatu penemuan baru yang terdahulu belum pernah terdapat sebelumnya. Hasilnya bisa berupa deskripsi atau gambaran terkait sebuah objek yang terdahulunya masih kurang jelas atau gelap yang mana sesudah dilakukan teliti akhirnya menjadi jelas, bisa mencakup relasi sebab-akibat atau kerja korelasi. Temua penelitian kualitatif belum tentu mampu menjawab pertanyaan yang diajukan pada awal pengambilan data, tetapi mungkin turut tak sama sekali, sebab sebagaimana sudah disebutkan, identifikasi serta rumusan masalah pada penelitian kualitatif itu masih memiliki sifat sementara serta bisa jadi dikembangkan saat mengerjakan penelitian pada lapangan.

Analisis dan Interpretasi data merupakan langkah guna melakukan kelola data dari hasil penelitian jadi data, dimana data dikumpulkan, diolah, dan digunakan sedemikian rupa sehingga memecahkan masalah yang timbul pada saat melakukan susunan hasil dari bagaimana kinerja program Kampung KB Kelurahan Pondok Kelapa.

#### **1.11.8 Keabsahan Data**

Mengacu pada pernyataan (Zuldafrial, 2012) menyatakan bahwa keabsahan data ialah suatu keselarasan berdasar pada konsep validitas serta reliabilitas merujuk pada penelitian versi kuantitatif serta dilakukan penyesuaian akan tuntutan kebutuhan pengetahuan, kriteria, serta modelnya

sendiri. Dengan menggunakan proses penghimpunan data yang akurat akan tercapai keabsahan data, satu di antaranya solusinya adalah dengan mengumpulkan data melalui proses triangulasi. Mengacu pada pernyataan Patton pada Afifuddin dalam (Sugiyono, 2020) terdapat empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan guna meraih keabsahan data, yakni seperti ini :

1. Triangulasi data

Memakai dari berbagai sumber data yakni mencakup arsip, dokumen, hasil observasi, hasil wawancara atau juga dengan mewawancarai sejumlah subjek yang dianggap mempunyai cara pandang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang juga melakukan pemeriksaan hasil penghimpunan data. Pada penelitian ini, misal pembimbing berperan sebagai pengamat (expert judgement) yang berkontribusi memberi masukan pada hasil penghimpunan data.

3. Triangulasi Teori

Pemakaian beragam teori yang berlainan guna melakukan pemastian bahwa data yang dihimpun telah memiliki pemenuhan pada syarat.

4. Triangulasi Metode

Pemakaian beragam metode guna melakukan penelitian sebuah hal, yakni mencakup metode wawancara serta observasi.

Berdasar pada keempat teknik pemeriksaan keabsahan peneliti memakai triangulasi data serta triangulasi metode. Triangulasi data memakai beragam sumber data, yakni mencakup dokumen, arsip hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai beberapa subjek yang dirasa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sementara triangulasi metode peneliti memakai beragam metode guna melakukan teliti akan sebuah hal. Pada kajian ini peneliti memakai metode penelitian wawancara, observasi, serta dokumentasi.